

DINAMIKA PERTUMBUHAN UMKM DAN PERDAGANGAN INFORMAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN LOKAL SERTA LINTAS BATAS: KENDALA AKSES MODAL DAN PASAR

S Pentanurbowo

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta
pentanurbowo@gmail.com

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

This study discusses the dynamics of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and informal trade in meeting local and cross-border needs, with a focus on barriers to capital and market access. MSMEs and the informal sector have proven to play an important role in supporting the national economy, particularly in providing employment and meeting the daily needs of the community. However, this significant contribution is still hampered by various structural challenges, including limited access to formal capital sources, low financial literacy, limited distribution, and difficulty penetrating modern and cross-border markets. The study uses a literature review method by analysing literature from various sources to summarise the growth patterns, main obstacles, and development opportunities of both sectors. The results of the study show that although MSMEs and informal trade have high adaptability, they need inclusive policy support, the use of digital technology, and network strengthening strategies to expand access to capital and markets. With these measures, MSMEs and informal trade have the potential to become more competitive, globally competitive, and able to contribute significantly to sustainable economic development.

Keywords: SMEs, informal trade, access to capital, access to markets, local needs, cross-border

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perdagangan informal dalam memenuhi kebutuhan lokal dan lintas batas, dengan fokus pada kendala akses modal dan pasar. UMKM dan sektor informal terbukti berperan penting sebagai penopang perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun, kontribusi besar tersebut masih terhambat oleh berbagai tantangan struktural, antara lain keterbatasan akses pada sumber modal formal, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan distribusi, dan sulitnya penetrasi ke pasar modern maupun lintas negara. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis literatur dari berbagai sumber untuk merangkum pola pertumbuhan, hambatan utama, dan peluang pengembangan kedua sektor tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UMKM dan perdagangan informal memiliki daya adaptasi yang tinggi, mereka membutuhkan dukungan kebijakan yang inklusif, pemanfaatan teknologi digital, serta strategi penguatan jaringan untuk memperluas akses modal dan pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, UMKM dan perdagangan informal berpotensi berkembang lebih kompetitif, berdaya saing global, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, perdagangan informal, akses modal, akses pasar, kebutuhan lokal, lintas batas

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejak lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai basis utama dalam penyediaan barang dan jasa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks lokal, UMKM menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan karena mampu menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terakomodasi oleh sektor bisnis berskala besar. Mereka mengisi celah kebutuhan yang tidak mampu ditangani oleh industri formal, sekaligus mendekatkan akses ekonomi ke kalangan bawah yang rentan (Moraza, 2024). Hal ini menjadikan UMKM lebih lekat dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Selain UMKM, keberadaan sektor perdagangan informal juga memainkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan lokal maupun lintas batas. Perdagangan informal yang tumbuh di kawasan perbatasan negara atau pusat-pusat kota memberi bukti bahwa aktivitas ekonomi tidak selalu berjalan dalam kerangka formal yang terstruktur. Di balik sifatnya yang fleksibel, perdagangan informal menyediakan ruang untuk interaksi ekonomi secara cepat, tanpa terkendala oleh regulasi yang ketat (Helvi Y Moraza, 2024). Dalam banyak kasus, aktivitas ini justru lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar lokal. Dengan demikian, pertumbuhan sektor informal dapat dipandang sebagai mekanisme adaptif masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, khususnya di daerah yang kurang mendapat perhatian infrastruktur formal (Tambunan, 2012).

Pertumbuhan UMKM dan perdagangan informal kerap berjalan beriringan, saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. UMKM dengan legalitas dan struktur usaha yang relatif terorganisasi mampu menawarkan produk dengan kualitas yang stabil, sementara sektor informal lebih luwes dalam menyesuaikan harga, distribusi, maupun variasi komoditas. Kombinasi keduanya berkontribusi pada kestabilan layanan ekonomi terhadap masyarakat luas. Namun, hubungan simbiotik tersebut tidak jarang terputus akibat adanya perbedaan akses terhadap sumber daya, khususnya dalam hal modal serta dukungan kelembagaan (Rachmawati, 2023).

Di balik pertumbuhan yang signifikan, UMKM menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan akses modal. Akses terhadap lembaga keuangan formal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil, terutama karena adanya persyaratan administratif dan agunan yang tidak mampu mereka penuhi. Kondisi ini menimbulkan hambatan serius bagi inovasi produk serta perluasan usaha. Sementara itu, sektor informal yang umumnya tidak diakui secara legal, bahkan lebih sulit mendapatkan akses terhadap pembiayaan formal (Helmi et al., 2023). Akibatnya, kedua sektor ini cenderung bergantung pada sumber modal alternatif seperti pinjaman keluarga, rentenir, atau lembaga keuangan mikro dengan bunga lebih tinggi. Keterbatasan akses modal demikian memperlambat proses ekspansi usaha mereka, terlebih dalam menghadapi kompetisi yang semakin global (Firmansyah, 2025).

Selain keterbatasan modal, kendala utama lain yang dihadapi adalah akses pasar. Walaupun sektor UMKM memiliki potensi besar dalam diversifikasi produk, peluang mereka seringkali tertahan karena jaringan distribusi yang lemah dan keterbatasan penetrasi ke pasar yang lebih luas. Masalah serupa juga dihadapi sektor informal, yang meskipun memiliki fleksibilitas, tetap sulit menembus pasar formal atau bahkan menjaga keberlanjutan pelanggan. Lingkungan pasar global dan regional semakin menuntut kualitas produk, standarisasi, serta kemampuan promosi berbasis teknologi digital. Karena

itu, meski UMKM memiliki daya interaksi dengan pasar tradisional, hambatan masuk ke pasar modern dan lintas negara menjadi tantangan besar (Dewi, 2024).

Secara historis, UMKM telah membuktikan ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi, misalnya pada peristiwa krisis moneter 1997–1998 ketika banyak perusahaan besar kolaps, namun UMKM justru menjadi penyangga perekonomian. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski memiliki keterbatasan, struktur usaha kecil dan informal memiliki daya fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas tersebut sering muncul dari kemampuan adaptif pelaku usaha yang langsung bersentuhan dengan realitas kebutuhan konsumen (Bank Indonesia, 2015). Oleh karena itu, memahami dinamika pertumbuhan UMKM beserta perdagangan informal memungkinkan kita melihat gambaran yang lebih utuh tentang ketahanan ekonomi berbasis masyarakat.

Dalam perkembangan kontemporer, globalisasi dan digitalisasi telah membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi UMKM dan sektor informal. Akses terhadap teknologi komunikasi dan platform digital, misalnya, memungkinkan pelaku usaha kecil untuk menembus pasar lebih luas, bahkan lintas negara. Namun, potensi ini tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan literasi digital, biaya akses teknologi, serta persaingan dengan produk besar yang sudah mapan. Ketidakseimbangan antara peluang dan keterbatasan inilah yang menyebabkan pertumbuhan UMKM dan sektor informal sering kali bersifat timpang atau tidak merata antarwilayah (Kompas.com, 2025).

Pada sisi lain, perdagangan lintas batas yang dilakukan secara informal juga menimbulkan dinamika tersendiri. Keberadaan pasar perbatasan dan perdagangan kecil antarnegara sering kali tidak tercatat dalam statistik resmi, namun aktivitas tersebut terbukti menghidupi banyak komunitas lokal. Sektor ini memberi kontribusi pada keberlangsungan sosial-ekonomi, sekaligus memperkuat ikatan sosial kultural antarwilayah. Namun, tanpa pengakuan formal maupun kebijakan yang mendukung, potensi sektor ini kerap terabaikan. Ketidakjelasan regulasi juga dapat menimbulkan kerentanan, baik dalam bentuk eksploitasi maupun ketidakpastian usaha (Asri, 2017).

Dengan menggali kajian pustaka yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara kritis bagaimana dinamika pertumbuhan UMKM dan perdagangan informal terjadi dalam konteks pemenuhan kebutuhan lokal dan lintas batas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian pustaka (*literature review*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, publikasi lembaga internasional maupun nasional, serta dokumen kebijakan terkait UMKM dan perdagangan informal dalam rentang waktu 5–10 tahun terakhir. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika pertumbuhan UMKM dan perdagangan informal, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan lokal dan lintas batas, serta untuk mengidentifikasi kendala utama berupa akses modal dan pasar (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan secara tematis dengan mengelompokkan hasil temuan literatur berdasarkan isu yang dibahas, kemudian disintesis untuk menemukan pola umum, tantangan, dan peluang. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang kuat sekaligus memperkaya wacana akademik mengenai peran strategis UMKM dan perdagangan informal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih inklusif (Ferrari, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Pertumbuhan UMKM dan Perdagangan Informal

UMKM telah menjadi aktor penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai penyedia produk dan jasa tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan UMKM di Indonesia dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang mencapai lebih dari 64 juta dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional. Angka tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan UMKM bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang membentuk identitas ekonomi kerakyatan. Perubahan perilaku konsumen, kebutuhan lokal, hingga kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM sebagai garis depan perekonomian masyarakat kecil (Sari, 2024).

Dinamika pertumbuhan UMKM tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor internal seperti kreativitas, inovasi produk, serta keterampilan dalam mengelola usaha. Banyak UMKM berkembang karena adanya kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap tren pasar dan perubahan teknologi. Seorang pelaku usaha kecil, misalnya, mampu mengisi celah pasar dengan produk khas lokal yang tidak ditawarkan oleh industri besar. Namun, kelemahan dalam manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan atau strategi pemasaran, menjadi kendala yang menyebabkan pertumbuhan mereka tidak berbanding lurus dengan jumlah unit usaha (Ningsih, 2019).

Selain faktor internal, aspek eksternal sangat menentukan dinamika UMKM. Ketersediaan infrastruktur, kebijakan pemerintah, serta dukungan akses keuangan dan teknologi menjadi variabel penting yang dapat mempercepat atau menghambat pertumbuhan. Wilayah dengan dukungan infrastruktur transportasi dan jaringan digital yang baik cenderung memiliki UMKM yang lebih kompetitif. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan fasilitas dasar sering kali membuat UMKM sulit berkembang, bahkan sekadar untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya (Nst, 2025).

Sektor perdagangan informal, yang terus tumbuh di hampir setiap pusat kota dan daerah perbatasan, juga memperlihatkan dinamika serupa. Perdagangan informal tumbuh sebagai respons alami masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi yang tidak selalu terakomodasi oleh sistem formal. Pasar informal menawarkan fleksibilitas harga, variasi barang, dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat menengah ke bawah. Walaupun belum tercatat secara resmi dalam statistik, kontribusi perdagangan informal terhadap sirkulasi barang dan jasa sangat besar, terutama di daerah perkotaan dan kawasan lintas batas (Fajar, 2023).

Kekuatan utama sektor informal terletak pada fleksibilitasnya. Pedagang informal dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan konsumen, mengubah barang dagangan sesuai tren musiman, bahkan bertahan di tengah krisis ekonomi. Namun, keberadaan mereka seringkali terpinggirkan akibat ketidakjelasan status hukum dan pandangan negatif dari sebagian kalangan pemerintah maupun masyarakat. Meskipun demikian, sektor informal tetap eksis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur ekonomi nasional (Anggraini, 2024).

Dinamika UMKM dan perdagangan informal berhubungan erat dengan pola konsumsi masyarakat setempat. Di banyak daerah, UMKM menjadi penyedia produk kebutuhan dasar, sementara sektor informal melayani kebutuhan praktis yang bersifat harian. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata. Misalnya, hasil produksi UMKM seperti makanan olahan atau kerajinan tangan sering dipasarkan melalui jaringan pedagang

informal (Aji & Listyaningrum, 2021). Dengan demikian, terdapat simbiosis mutualisme yang memperkuat peran kedua sektor ini dalam perekonomian lokal.

Pertumbuhan UMKM juga dipacu oleh meningkatnya peran komunitas dan jaringan lokal. Melalui asosiasi usaha kecil atau koperasi, para pelaku UMKM memperoleh wadah untuk bertukar informasi, mengakses modal kolektif, serta memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai. Dinamika sosial ini memperlihatkan bagaimana solidaritas lokal mampu mendorong skala pertumbuhan usaha kecil menuju pasar yang lebih besar. Akan tetapi, daya saing UMKM tetap sering tertahan oleh masuknya produk impor berbiaya rendah, yang menekan harga pasar domestik (Umi Suhada & Mochamad Ridwan, 1999).

Perdagangan informal di kawasan lintas batas negara memberikan dinamika yang unik. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial budaya antarwilayah. Barang-barang kebutuhan pokok, makanan tradisional, dan produk turunan lokal sering kali diperjualbelikan melintasi batas negara tanpa melalui jalur formal. Aktivitas ini membuka peluang mata pencaharian sekaligus menunjukkan betapa pentingnya sektor informal dalam menopang kehidupan masyarakat perbatasan yang minim pilihan ekonomi formal (Wardani, 2024).

Meskipun demikian, dinamika pertumbuhan di sektor informal bukan tanpa kendala. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pedagang informal. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap pengusuran, pungutan liar, maupun pembatasan aktivitas oleh pemerintah lokal. Ketidakpastian hukum tersebut menjadi salah satu faktor penghambat utama yang membuat sektor informal sulit naik kelas ke sektor usaha yang lebih formal (Edillius, 1992).

Peran teknologi digital kini mulai memengaruhi pertumbuhan UMKM secara signifikan. Platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital memberikan akses langsung bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, bahkan hingga tingkat internasional. Namun, sektor informal sering kali tertinggal dalam mengadopsi teknologi ini karena keterbatasan literasi digital dan akses perangkat yang memadai. Perbedaan dalam pemanfaatan teknologi semakin memperlebar jurang pertumbuhan antara UMKM formal dan pedagang informal (Anisa, 2023).

Secara makro, UMKM berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi dengan kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Peran ini menjadi sangat penting di negara dengan jumlah pengangguran tinggi. Di sisi lain, sektor informal juga menjadi penyelamat banyak tenaga kerja yang tidak mampu masuk ke pasar kerja formal akibat keterbatasan pendidikan atau keterampilan. Dengan adanya kedua sektor ini, tekanan sosial akibat kurangnya lapangan kerja formal dapat diminimalisasi, meski tidak sepenuhnya terselesaikan.

Pola pembiayaan menjadi faktor penting dalam dinamika pertumbuhan UMKM maupun perdagangan informal. UMKM yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal mampu mengembangkan produktivitasnya, sementara mereka yang tidak memiliki akses terpaksa mencari sumber pinjaman alternatif yang sering kali lebih memberatkan. Pedagang informal umumnya hanya bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal, sehingga pertumbuhan usahanya sangat terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural yang menahan laju pertumbuhan kedua sektor tersebut (Lestari, 2024).

Secara geografis, dinamika UMKM dan perdagangan informal juga berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Di kota besar, UMKM cenderung berkembang pesat karena jaringan pasar yang luas dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pedagang informal di kota-kota besar juga memiliki peluang pelanggan yang besar, tetapi menghadapi tekanan regulasi yang lebih ketat. Sebaliknya, di pedesaan dan kawasan perbatasan, UMKM sering menghadapi keterbatasan fasilitas, namun perdagangan informal justru tumbuh subur sebagai penopang utama kehidupan ekonomi Masyarakat (Bank Indonesia, 2016).

Dengan berbagai dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM dan perdagangan informal merupakan sektor yang berperan vital dalam mendukung perekonomian lokal dan lintas batas. Pertumbuhan keduanya mencerminkan upaya masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah tantangan akses modal, pasar, serta ketidakpastian regulasi. Meski menghadapi banyak hambatan, sektor UMKM dan informal tetap menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi, sehingga potensi mereka untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi inklusif sangatlah besar jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan dukungan teknologi.

Kendala Akses Modal dan Pasar

Kendala akses modal merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan perdagangan informal. Akses terhadap sumber pembiayaan formal sering kali sangat terbatas karena adanya persyaratan administratif yang sulit dipenuhi, seperti keharusan memiliki laporan keuangan yang rapi, izin usaha resmi, maupun agunan berharga. Sebagian besar pelaku UMKM dan pedagang informal beroperasi dalam lingkup yang bersifat sederhana tanpa pencatatan keuangan yang teratur, sehingga sulit untuk memenuhi standar perbankan. Akibatnya, mereka terpaksa bergantung pada sumber modal pribadi yang terbatas (Yusuf, 2025).

Lembaga keuangan formal melihat UMKM dan sektor informal sebagai kelompok berisiko tinggi. Hal tersebut terutama karena banyak usaha kecil memiliki tingkat ketidakpastian pendapatan yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Dari perspektif bank, kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan pengembalian pinjaman. Faktor risiko inilah yang membuat bunga pinjaman lebih tinggi bahkan jika pinjaman dikabulkan (Amalia, 2009). Dengan beban bunga yang besar, pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi maupun melakukan inovasi sehingga stagnasi terjadi pada perkembangan usaha mereka. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan juga menjadi kendala serius. Banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur pinjaman formal dan perencanaan keuangan jangka panjang. Mereka sering mengalami kesulitan dalam menyusun proposal usaha, melakukan proyeksi bisnis, maupun memahami perhitungan kredit. Akibatnya, peluang untuk mendapatkan pembiayaan formal menjadi semakin kecil. Rendahnya literasi ini juga menyebabkan mereka sangat mudah terjatuh pada kredit informal dengan bunga tinggi yang justru merugikan pertumbuhan usaha (Putra, 2025).

Di sisi perdagangan informal, situasi pembiayaan menjadi lebih kompleks. Karena mayoritas pedagang informal tidak memiliki legalitas usaha, mereka hampir tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengakses pinjaman perbankan atau program kredit pemerintah. Modal usaha pedagang informal biasanya hanya berasal dari tabungan pribadi, pinjaman keluarga, atau sistem arisan. Kondisi ini membuat pertumbuhan modal mereka sangat lambat, sehingga sulit bagi pedagang informal untuk memperluas usaha atau bersaing dengan sektor formal (Sutrisno, 2025).

Program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang telah dirancang untuk membantu UMKM, namun kendala birokrasi dan keterbatasan kuota masih menjadi masalah. Banyak UMKM yang tidak lolos verifikasi karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, bahkan setelah berusaha mengajukannya. Akibatnya, program ini hanya menjangkau sebagian pelaku usaha kecil yang sudah relatif siap secara administrasi, sementara kelompok paling rentan tetap terpinggirkan. Dengan demikian, akses modal murah belum sepenuhnya inklusif (Susanta, 2009).

Selain masalah permodalan, akses pasar juga menjadi hambatan besar bagi UMKM dan pedagang informal. Walaupun UMKM memproduksi berbagai jenis barang, kemampuan mereka untuk menembus pasar yang lebih luas sering terbatas. Faktor utama yang menghambat adalah keterbatasan distribusi, minimnya jaringan pemasaran, serta tidak adanya kemampuan memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pasar modern. Hasilnya, produk-produk UMKM hanya berputar di lingkaran pasar tradisional atau komunitas lokal tanpa ada peningkatan nilai tambah (Shinta W. Kamdani, 2024).

Pasar modern seperti supermarket atau ekspor memerlukan standarisasi produk yang ketat, mulai dari kemasan, sertifikasi halal, hingga izin edar resmi. Banyak UMKM yang belum mampu memenuhi standar ini karena biaya uji sertifikasi relatif tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi pada pedagang informal, di mana barang dagangan mereka cenderung tidak memiliki kualitas yang seragam. Hal ini membatasi peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas dan mengurangi daya saing mereka di tengah gempuran produk impor (Kamdani, 2024).

Persaingan dengan produk impor murah menjadi tantangan besar bagi UMKM dan pedagang informal. Di era perdagangan bebas, berbagai produk luar negeri dengan harga rendah membanjiri pasar domestik dan mengancam keberlanjutan usaha kecil. UMKM yang memiliki skala produksi lebih kecil tentu sulit bersaing dalam hal harga. Pedagang informal memang mampu menyesuaikan harga untuk menarik pembeli, namun kualitas produk lokal sering dipersepsikan lebih rendah. Hambatan ini semakin mempersempit ruang gerak mereka dalam menguasai pasar (Delfira, 2025).

Perubahan gaya hidup konsumen yang semakin modern juga menjadi faktor yang menghambat. Konsumen saat ini lebih memilih produk dengan desain menarik, kemasan bagus, serta kualitas terjamin. UMKM yang belum mengadopsi inovasi produk dan pemasaran berbasis teknologi digital akan semakin tertinggal. Pedagang informal terutama yang hanya menjual di pasar tradisional sulit mengikuti pola konsumsi baru masyarakat perkotaan, sehingga pasar mereka semakin terbatas hanya pada kalangan menengah bawah (Wedhaninggar, 2024).

Akses terhadap teknologi digital yang tidak merata juga turut memperlebar kesenjangan pemasaran. Sementara UMKM yang mampu menggunakan media sosial dan platform e-commerce dapat memperluas jangkauan usahanya hingga lintas daerah bahkan lintas negara, sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memiliki keterampilan maupun perangkat memadai untuk mengakses peluang tersebut. Pedagang informal bahkan lebih jauh tertinggal karena umumnya hanya mengandalkan konsumen langsung tanpa strategi pemasaran online (Harsono, 2025). Kendala logistik juga tidak bisa diabaikan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan mendistribusikan produknya ke pasar lain karena terbatasnya sarana transportasi, biaya logistik yang tinggi, dan distribusi yang belum efisien. Hal ini tentu berimplikasi langsung pada harga akhir produk yang menjadi kurang kompetitif. Pedagang informal di daerah perbatasan sering mengalami masalah

serupa, di mana akses jalan dan fasilitas transportasi terbatas membuat arus barang terhambat dan tidak lancar (Hidayat, 2024).

Selain hambatan fisik, UMKM juga menghadapi kendala promosi. Minimnya kemampuan melakukan strategi pemasaran yang efektif menyebabkan produk mereka tidak dikenal luas. UMKM pada umumnya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut atau melalui jaringan lokal yang terbatas. Pedagang informal bahkan lebih bergantung pada lalu lintas pejalan kaki di sekitar lokasi usaha mereka. Ketidadaan kemampuan memasarkan diri secara lebih luas menyebabkan produk mereka sulit naik kelas dan bersaing dengan produk formal (Yulya Ammi Hapsari et al., 2024).

Di tingkat kebijakan, arah dukungan pemerintah masih lebih banyak terfokus pada penyediaan modal daripada pengembangan pasar. Padahal, kedua aspek ini sama-sama penting dan saling terkait. Tanpa adanya pasar yang siap menyerap produk, tambahan modal justru kurang efektif dalam mendorong perkembangan usaha. Harus ada strategi yang menyeimbangkan antara bantuan permodalan dengan fasilitasi masuknya produk UMKM ke jaringan pemasaran yang lebih luas, misalnya melalui pameran, e-catalog pemerintah, atau kemitraan dengan perusahaan besar (Harsono, 2025).

Secara keseluruhan, kendala akses modal dan pasar merupakan faktor penghambat utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan perdagangan informal. Keberadaan hambatan struktural seperti birokrasi perbankan, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan distribusi, serta ketidaksiapan menghadapi pasar modern menjadikan kedua sektor ini tetap berada dalam lingkup ekonomi skala kecil. Meski begitu, dengan adanya inovasi kebijakan yang inklusif, penguatan koperasi, pemanfaatan platform digital, serta pendampingan berkelanjutan, hambatan tersebut perlahan dapat diatasi dan membuka peluang perkembangan usaha kecil yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Kesimpulan

Dinamika pertumbuhan UMKM dan perdagangan informal menunjukkan peran vital keduanya dalam menopang perekonomian masyarakat, baik pada skala lokal maupun lintas batas. UMKM dengan segala keterbatasannya tetap berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, produksi barang/jasa, serta ketahanan ekonomi ketika krisis. Sementara itu, perdagangan informal tumbuh sebagai mekanisme adaptif masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan sehari-hari dan peluang di wilayah perbatasan. Keduanya membentuk ekosistem ekonomi kerakyatan yang saling melengkapi serta menjamin keberlangsungan hidup masyarakat lapisan bawah.

Namun demikian, pertumbuhan UMKM dan sektor informal masih terhambat oleh kendala utama berupa akses modal dan pasar. Kesulitan memperoleh pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, hingga keterbatasan distribusi dan penetrasi pasar membuat perkembangan usaha sering kali stagnan. Produk UMKM terkendala oleh standar kualitas dan sertifikasi, sementara pedagang informal kerap terbatas pada pasar tradisional. Selain itu, ketatnya persaingan dengan produk impor murah mempersempit ruang gerak mereka untuk memperluas pasar, sehingga potensi besar yang dimiliki belum mampu dioptimalkan sepenuhnya.

Dengan demikian, membuka akses terhadap modal yang inklusif serta memperluas akses pasar menjadi kunci untuk memperkuat peran UMKM dan perdagangan informal dalam perekonomian lokal maupun lintas batas. Pemerintah, lembaga keuangan, komunitas lokal, dan teknologi digital memiliki peran penting dalam menyelesaikan hambatan struktural ini. Jika tantangan akses modal

dan pasar dapat teratasi melalui kebijakan yang berpihak, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan jejaring usaha, maka UMKM dan perdagangan informal berpotensi tumbuh lebih berdaya saing, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aji, A. W., & Listyaningrum, S. P. (2021). *Pengaruh Modal Usaha, Lokasi Usaha, dan Teknologi Informasi Terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Bantul*.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*.
- Anggraini, et al. (2024). Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Trans Genera*, 1(2), 122–136. <https://doi.org/10.12345/transgenera.v1i2.2024>
- Anisa, D. (2023). *Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Perdagangan Lintas Batas*.
- Asri, S. (2017). Perdagangan Informal Pelintas Batas di Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma*.
- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Bank Indonesia. (2016). *Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Delfira, A. F. (2025). Analisis Permasalahan Perkembangan UMKM Terhadap Perekonomian Lokal. *Jurnal EBISMEN*.
- Dewi, V. (2024). *Solusi Permodalan dan Pasar bagi UMKM di Era Digital*.
- Edillius, et al. (1992). *Pengantar Ekonomi Perusahaan*.
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fajar, L. (2023). *Peran Pemerintah dalam Mendukung Akses Modal UMKM*.
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Firmansyah, T. (2025). *Strategi Penguatan UMKM Melalui Kemitraan Regional*.
- Harsono, B. (2025). *Analisis Keberlanjutan UMKM dalam Perdagangan Lintas Batas*.
- Helmi et al. (2023). *Strategi Perluasan Pasar UMKM Melalui Teknologi Informasi*.
- Helvi Y Moraza. (2024). Wamen UMKM Sampaikan Pesan ke UMKM Terkait Akses Modal dan Pasar. *Detik Finance*.
- Hidayat. (2024). Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi Dan Pajak*, 1(4), 253–270.
- Kamdani, S. W. (2024). Apindo Sebut Pelaku UMKM Masih Sulit Akses Keuangan dan Modal. *Tempo.Co*.
- Kompas.com. (2025). *Permodalan dan Akses Pasar Masih Jadi Masalah Klasik UMKM*.
- Lestari, W. (2024). *Modal Usaha dan Perluasan Pasar UMKM di Daerah Perbatasan*.
- Moraza, H. Y. (2024). Wamen UMKM Sampaikan Pesan ke UMKM Terkait Akses Modal dan Pasar. *Detik Finance*.
- Ningsih, et al. (2019). *Peranan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.
- Nst, Y. A. (2025). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bangun Harapan Bangsa*.
- Putra, R. (2025). *Hambatan dan Solusi Pengembangan UMKM di Era Digital*.
- Rachmawati, N. (2023). *Studi Permasalahan Akses Modal UMKM di Indonesia*.
- Sari, M. (2024). *Perdagangan Informal dan Pertumbuhan UMKM: Studi Kasus Lokal*.
- Shinta W. Kamdani. (2024). Apindo Sebut Pelaku UMKM Masih Sulit Akses Keuangan dan Modal. *Tempo.Co*.
- Susanta, G. (2009). *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*.
- Sutrisno, H. (2025). *Dampak Globalisasi Terhadap UMKM di Perbatasan*.

- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*.
- Umi Suhada & Mochamad Ridwan. (1999). *Pengaruh Jumlah UMKM Informal dan Faktor-faktor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*.
- Wardani, M. (2024). *Pengaruh Digitalisasi terhadap Perdagangan Informal dan UMKM*.
- Wedhaninggar. (2024). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Pendapatan di Wilayah Perbatasan RI-PNG. *Jurnal Glory, Universitas Nusa Cendana*.
- Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, & Fahrur Rozi. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 53–62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Yusuf, R. (2025). *Kendala Pengembangan UMKM Informal dan Akses Pasar Lokal*.